

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum urusan kepariwisataan, Kepemudaan dan Olah Raga. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya pada urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pilihan bidang pariwisata. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021, pada periode ini yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- Urusan wajib non pelayanan dasar bidang Kepemudaan dan Olah raga
 - ✓ Pembinaan olah raga yang belum terpadu antara olah raga pendidikan, di lingkungan persekolahan, olah raga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olah raga prestasi untuk kelompok atlit
 - ✓ Keterbatasan peran Pemerintah Daerah dalam proses penjangkaran atlet, penyaluran atlet dan pengembangan kompetensi atlet potensial secara berjenjang
 - ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga
 - ✓ Masih rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi tingkat regional dan nasional
 - ✓ Masih tingginya tingkat pengangguran pemuda sebagai dampak tingkat keterampilan yang masih rendah
 - ✓ Belum berjalannya pelayanan kepemudaan
 - ✓ Belum adanya kejelasan dalam pengelolaan urusan pelayanan kepemudaan dan olah raga

- Urusan pilihan bidang Pariwisata
 - ✓ Akseibilitas, Fasilitas, sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
 - ✓ Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
 - ✓ Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata
 - ✓ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata
 - ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat atas dampak (efek) positif pengembangan pariwisata
 - ✓ Belum optimalnya penggalan/ penelitian /kajian potensi pariwisata
 - ✓ Belum dimilikinya Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran penjabaran dari peraturan lebih tinggi yang mengatur pengembangan / pemanfaatan dan pelestarian potensi wisata.
 - ✓ Masih banyaknya potensi pariwisata yang belum dikembangkan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Kabupaten Tasikmalaya periode tahun 2016-2021 adalah "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN".

Religius Islami :

Religius Islami merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya (seluruh umat beragama. Religius

disini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan tidak terjebak dalam bentuk formal keagamaan, atau menjadikan spirit keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan napas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis :

Dinamis adalah mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi serta senantiasa bergerak ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik sesuai dengan tuntutan kemajuan namun tetap dalam bingkai nilai-nilai yang normatif.

Berdaya saing :

Berdaya saing yaitu mempunyai kemampuan dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan atas dasar efisien dan efektif sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dan dapat bersaing baik ditingkat lokal, regional maupun nasional.

Berbasis Perdesaan :

Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa orientasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas warga desa yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

Visi ini merupakan kesinambungan dari visi sebelumnya yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Uu Ruzhanul 'Ulum dan Ade Sugianto pada Pemilu pada Kabupaten Tasikmalaya 2015, terinspirasi oleh fakta dan data di lapangan khususnya daerah pedesaan di wilayah

Kabupaten Tasikmalaya, yang belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan, baik infrastruktur perhubungan, perekonomian rakyat pedesaan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Kondisi tersebut menyadarkan kepada kita, seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintahan daerah atau desa, dan pribadi H. Uu Ruzhanul 'Ulum dan Ade Sugianto sebagai salah seorang kandidat Bupati dan Wakil Bupati pada waktu itu, untuk mencanangkan program percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan.

Untuk mewujudkan suatu visi, dibutuhkan satu atau beberapa misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021, ditetapkan bahwa untuk mewujudkan Visi "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN" ditempuh melalui empat misi sebagai berikut :

- ❖ Misi Pertama
Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan berkualitas
- ❖ Misi Kedua
Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata
- ❖ Misi Ketiga
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

❖ Misi Keempat

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

Keempat misi tersebut ditopang dengan program-program prioritas yang dikemas dalam 'jargon' TASIK SIAP. Program prioritas "TASIK SIAP" sebagai kesinambungan dari program prioritas pada periode sebelumnya (Gerbang Desa). Adapun "Tasik Siap" mencakup hal-hal sebagai berikut :

❖ Siap 1

Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar, yang terdiri dari :

- ✓ Urusan Pendidikan
- ✓ Urusan kesehatan
- ✓ Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
- ✓ Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ✓ Urusan ketentraman dan ketertiban umum
- ✓ Urusan sosial

❖ Siap 2

Menjadikan sumber daya manusia berakhlak dan berkualitas

- ✓ Tingkat pendidikan mendekati D3 (angka harapan sekolah 15,29)
- ✓ Memiliki keterampilan dan kecakapan hidup dan semangat berkompetisi

❖ Siap 3

Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif, yang ditandai dengan :

- ✓ Meningkatnya industri menengah dan kecil dalam bidang pengolahan hasil pertanian

- ✓ Bertambah dan berkembangnya tujuan wisata dan jasa pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan ekonomi kreatif

❖ Siap 4

Mendayagunakan teknologi informasi agar mendatangkan hasil/manfaat, tepat guna agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Mendaya gunakan teknologi informasi bermakna teknologi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital sehingga keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan makin meluas dan pelayanan pemerintah meningkat dan efisien

❖ Siap 5

Menjamin kemudahan investasi. Membuka keran investasi daerah dengan penciptaan :

- ✓ Iklim yang kondusif
- ✓ Infrastruktur yang memadai
- ✓ Pelayanan perijinan yang sederhana
- ✓ Penyesuaian regulasi penataan ruang

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran dan fungsi dalam hal, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, secara spesifik, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berkontribusi langsung dalam mensukseskan pencapaian misi ke-1 yakni Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan berkualitas dan misi ke-2 yaitu Meningkatkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata.

Secara ekonomi, pembangunan pariwisata akan berdampak pada meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang diperoleh dari kunjungan wisatawan kepada obyek wisata, dan bisa menjadi sektor ikutan dari sektor pembangunan lainnya. Pembangunan sektor pertanian, perikanan dan peternakan umpamanya dapat diikuti sektor pariwisata dengan mengembangkan wisata agro, demikian pula sektor perdagangan dan industri dapat diberdayakan secara maksimal melalui pengembangan wisata kriya.

Upaya untuk melaksanakan Misi demi mewujudkan Visi tersebut diatas masih terkendala dengan faktor-faktor sebagai berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Disparpora Kab. Tasikmalaya
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI : "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN "				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, dan	Pelaksabnaan program kegiatan terkendala regulasi	Belum adanya perda tentang kepemudaaa n dan keolahragaa	

VISI : “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS PERDESAAN ”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkualitas		m	
2.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata	Pelaksabnaan program kegiatan terkendala regulasi	Belum adanya perda tentang kepariwisataan	Dokumen RIPPARDA sudah ada

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan beitu besarnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata. Dalam Renstra Kementerian Pariwasata disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata diantaranya;

Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat dan serta Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kepariwisataan

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dalam menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, pembangunan Kabupaten Tasikmalaya diselaraskan dengan RPJPD kabupaten Tasikmalaya 2005-

2025, yaitu : Visi “Kabupaten Tasikmalaya yang religious / Islami, maju dan sejahtera tahun 2025.” dengan 4 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
4. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang lebih merata dengan memperhatikan aspek lingkungan yang asri dan lestari

3.3.1 Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

❖ Visi Kementerian Pariwisata dan Budaya adalah Terwujudnya Bangsa Indonesia Yang Mampu Memperkuat Jati Diri Dan Karakter Bangsa Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini ditempuh dengan empat Misi sebagai berikut :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Kementrian Pariwisata beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi : “Terwujudnya Bangsa Indonesia Yang Mampu Memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghamb at	Pendoron g
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing)	Pelaksanaan program kegiatan terkendala regulasi	Belum adanya peraturan Daerah Kab. Tasikmala tentang kepariwisataan	Dokumen RIPPARDA sudah ada

- ❖ Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah ‘ Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.’”

Untuk mewujudkan visi ini ditempuh dengan empat Misi sebagai berikut :

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama
3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran HIV AIDs, dan penyakit menular seksual di kalangan muda

Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Visi :				
“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama	Pelaksanaan program kegiatan terkendala regulasi	Belum adanya peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya tentang kepemudaan dan keolahragaan	Ada komitmen dari Komisi IV untuk memfasilitasi pembentukan Perda kepemudaan dan keolahragaan

3.3.2 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Barat

❖ Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat adalah "Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Daerah Budaya dan Tujuan Wisata Andalan." Dengan lima Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal;
- 2) Pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset budaya yang mendukung upaya pengembangan kepariwisataan Jawa Barat;

- 3) Mengefektifkan kebudayaan sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha jasa pariwisata;
- 4) Mempromosikan kepariwisataan Jawa Barat;
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata dan budaya;

Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Renstra DisbudparPropinsi Jawa Barat
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Visi : "Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Daerah Budaya Dan Tujuan Wisata Andalan."				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi local	Pelaksanaan program kegiatan kepariwisataan terkendala regulasi	Belum adanya peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya tentang kepariwisataan	Dokumen RIPPARDA sudah ada
2	Mempromosikan kepariwisataan Jawa Barat			

❖ Renstra Dinas Olah raga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat

Pada tahun 2013-2018, Visi Dinas Olah raga dan Pemuda Propinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat (Mandiri Jaya Raga)". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh dengan dua Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kemandirian Pemuda dan Prestasi olahraga Jawa Barat.
 - 2) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pelayanan Organisasi
- Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Renstra Disorda Propinsi Jawa Barat
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Visi : "Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat (Mandiri Jaya Raga)"				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan kemandirian Pemuda dan Prestasi olahraga Jawa Barat	Pelaksanaan program /kegiatan kepemudaan dan keolahragaan terkendala regulasi	Belum adanya peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya tentang kepemudaan dan keolahragaan	Ada komitmen dari Komisi IV untuk memfasilitasi pembentukan Perda kepemudaan dan keolahragaan
2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pelayanan Organisasi			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya adalah panduan kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang / wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terpadu dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, pelaksanaan suatu program.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong

No	RTRW	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Belum teridentifikasi, terinventarisasi dan termanfaatkannya sumberdaya pariwisata secara optimal	Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD lain yang berkompeten dalam mendukung pengembangan potensi wisata perdesaan khususnya wisata agro dan wanawisata	Potensi daya tarik wisata telah terinventarisir dalam RIPARDA dan sesuai dengan RTRW

Adapun hasil penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dihubungkan dengan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tabel dibawah ini

Permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
berdasarkan telaahan KLHS
beserta faktor penghambat dan pendorong

No	KLHS	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip	Belum semua dokumen perencanaan program dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup	Kurang tersosialisasikannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kajian Lingkungan Hidup Strategis diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009

	pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Strategis		tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
--	---	-----------	--	---

Dalam rangka mengembangkan potensi wisata, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara konseptual telah diformulasikan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tasikmalaya yang membagi tiga jenis wisata, yakni : (a) Wisata alam (Wisata tirta/bahari, Wisata air panas, Wisata sungai dan Wisata agro, (b) Wisata budaya dan, dan (c) Wisata buatan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Arah dan strategi kebijakan pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai keadaan potensi kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Tasikmalaya. Pada periode ini yang menjadi isu strrtategis

dalam penyelenggaraan bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- ❖ Urusan wajib non pelayanan dasar bidang Kepemudaan dan Olah raga
 - ✓ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan
 - ✓ Pembinaan olah raga yang belum terpadu antara olah raga pendidikan, di lingkungan persekolahan, olah raga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olah raga prestasi untuk kelompok atlit
 - ✓ Keterbatasan peran Pemerintah Daerah dalam proses penjarangan atlet, penyaluran atlet dan pengembangan kompetensi atlet potensial secara berjenjang
 - ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga
 - ✓ Masih rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi tingkat regional dan nasional
 - ✓ Masih tingginya tingkat pengangguran pemuda sebagai dampak tingkat keterampilan yang masih rendah
 - ✓ Belum berjalannya pelayanan kepemudaan
 - ✓ Belum adanya kejelasan dalam pengelolaan urusan pelayanan kepemudaan dan olah raga

- ❖ Urusan pilihan bidang Pariwisata
 - ✓ Aksebilitas, fasilitas, sarana dan prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
 - ✓ Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
 - ✓ Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata
 - ✓ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata